

**PENGARUH PENGAWASAN INTERN, SISTEM ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)**

**Oleh:
Tri Rosmarini
Pembimbing : Ria Nelly Sari dan Lila Anggraini**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : trirosmarini@yahoo.com

*The Influence Of Internal Control, Performance Based Budgeting System,
Financial Management Information System.
(The Empirical Study On SKPD Kabupaten Rokan Hulu)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the influence of the internal control, performance based budgeting system, financial management information system on SKPD performance. The population in this study were employed who worked in the SKPD Kabupaten Rokan Hulu (27 government agencies). The sampling method used in this study is proportioned stratified random sampling method. The respondent in this study is the employee Eselon III and Eselon IV SKPD. The sample used in this study were 108 respondents. The hypotheses then tested is multiple linear regression analysis by using SPSS version 20.0. The result of this study indicated that the internal control, performance based budgeting system, financial management information system has significantly effect on SKPD performance. The magnitude of the effect (R^2) the internal control, performance based budgeting system, financial management information system, the performance of SKPD was ,45,7%. While the remaining 54,3% is influenced by other independent variabel that are not observed in this study.

Keywords : Performance, Budgeting, Financial, Information System and Internal Control.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan banyak hal positif dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemusatan kekuasaan yang dahulunya menjadi kendala akan kemajuan suatu daerah telah diatasi dengan adanya pemerataan wewenang ini. Menurut Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan ini, setiap daerah memiliki keleluasaan

untuk bertindak secara cepat dan diharapkan tepat. Namun realita yang terjadi saat ini tidaklah sesuai. Kekuasaan yang dimiliki daerah justru memicu munculnya berbagai permasalahan yang serius. Salah satu diantaranya adalah masalah kinerja.

Berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil akhir SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2011 hanya ada dua instansi pusat mendapat nilai A, tahun 2012 bertambah menjadi tiga instansi. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun 2011 baru dua provinsi yang mendapat nilai B, dan tahun 2014 menjadi enam provinsi. Meskipun demikian masih banyak instansi pusat pemerintah provinsi yang mendapat nilai kurang bagus, yang akibatnya adanya ketidakselarasan antara Renstra dengan RPJMN, ketidakmampuan mendefinisikan kinerja dan menyusun indikator kerja serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran.

Kinerja pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkatan

pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, secara dampak positif dan negatif kebijakan operasional yang telah diambil.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya. Baik dari sisi individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Salah satu cara yang sedang diupayakan dalam meningkatkan kinerja di lembaga pemerintahan adalah dengan melakukan pengawasan intern. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja melalui suatu pelaksanaan pengawasan internal organisasi pemerintah. Pengawasan interndimaksudkan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi organisasi dan kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada dan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kabupaten Rokan Hulu juga telah menerapkan pengawasan tersebut, namun penerapannya belum

berjalan dengan efektif karena masih adanya berbagai temuan yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur pengendalian internal, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam penerapannya. Sejak tahun 2002 hingga 2010, pihak Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu mendata sekitar 1.247 temuan yang didominasi akibat kesalahan dan kelemahan administrasi dan juga lemahnya pengawasan intern dari beberapa satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan Primadona (2012) berpendapat bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi pemerintah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Wirawati (2014).

Untuk menunjang tercapainya kinerja pemerintahan yang baik, juga diperlukan suatu sistem anggaran berbasis kinerja. SABK atau sistem anggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan APBD yang diberlakukan dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penerapannya diharapkan dapat mendorong proses pembangunan menjadi lebih efisien dan partisipatif, karena melibatkan pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan, bahkan dalam tahap tertentu juga melibatkan warga masyarakat sebagai penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Melalui SABK keterkaitan antara nilai uang dan hasil dapat diidentifikasi, sehingga program dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, jika

ada perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Dengan penganggaran berbasis kinerja dan proses yang lebih partisipatif diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja SKPD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arif (2013) yang menunjukkan adanya pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD.

Upaya lainnya yang dianggap berpengaruh dalam hal meningkatkan kinerja pemerintahan adalah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) kini didasarkan pada Basis Akrua. SAP tahun 2010 ini mulai efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010.

Untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan SAP dan pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan reformasi dibidang sistem informasi. Tuntutan akan ketersediaan laporan keuangan daerah yang efektif, efisien serta handal dan terpercaya seperti yang telah dipaparkan diatas, mengharuskan adanya penggunaan teknologi informasi, tugas para pengelola keuangan daerah akan sangat terbantu karena melalui sistem teknologi informasi akan menghasilkan formulir ataupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh aparat SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penelitian yang menghubungkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja SKPD dilakukan oleh Arif (2013) yang menemukan bahwa terdapat peran yang cukup signifikan dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2012, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun pada tahun 2013 dan 2014 berturut-turut Rokan Hulu menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan dari BPK RI. Adapun penjelasan tersebut terkait laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hulu, kelemahan sistem pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Serta akun yang terkait dalam opini BPK RI Tahun Anggaran 2014 diantaranya: *Pertama*, pengendalian Pengendalian atas pengelolaan kas daerah oleh pejabat pengelola keuangan daerah

belum memadai. *Kedua*, Pengelolaan aset tetap pada pemerintah kabupaten rokan hulu belum memadai. *Ketiga*, Terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran yang terlambat disetorkan dan belum disetorkan ke kas daerah/negara dan kelebihan pembayaran atas empat paket kegiatan pada dinas pertambangan dan energi. Opini ini tentu menjelaskan bahwa semua hal yang dianggap material telah disajikan secara wajar di dalam laporan keuangannya. Tetapi walaupun demikian, masih terdapat kelemahan, temuan-temuan dan belum efektifnya kinerja di kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti pengaruh pengawasan intern, sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian tersebut adalah : 1) Apakah pengawasan intern berpengaruh terhadap Kinerja SKPD di Kabupaten Rokan Hulu?, 2) Apakah sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Kinerja SKPD di Kabupaten Rokan Hulu?, 3) Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap Kinerja SKPD di Kabupaten Rokan Hulu ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu. 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja SKPD

Menurut Bodnar dan William (2006), pengawasan internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah, 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2) Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, 3) Inspektorat Provinsi, dan 4) Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kota. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif harus: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan melalui: audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Wawan (2009:33) menyatakan bahwa permasalahan yang terkait dengan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya sistem pembukuan atau akuntansi, pengendalian, pengawasan dan sistem informasi keuangan daerah yang mengakibatkan rendahnya unsur transparansi dan akuntabilitas serta menyulitkan pengawasan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

Pengawasan yang efektif dan efisien harus dilakukan kontinu agar dapat diketahui perubahan dan perbaikan yang telah atau belum dikerjakan dari temuan berupa kekurangan atau kelemahan antara dua atau lebih kegiatan pengawasan. Pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. (Arifin Sabaeni dan Imam Gozali, 1997:97). Sedangkan Abdul Halim (2004:33) mengemukakan bahwa pengawasan intern merupakan langkah sistem atau alat yang menyediakan jaminan atas keberhasilan sasaran kinerja suatu kegiatan. Untuk memperoleh jaminan yang cukup dari sasaran kinerja perlu melancarkan dan memperlakukan pengawasan-pengawasan yang efektif terhadap suatu aktivitas. Penelitian Tuasikal (2008) juga menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh

secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dilakukan oleh pihak satuan kerja. Hasil penelitian Primadona (2012) juga menyatakan bahwa pengawasan intern memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja SKPD.

2. Pengaruh Sistem Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD

Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Jika kita dapat mengukur, mengawasi, mengatur dan memperbaikinya maka sistem penganggaran yang efektif dapat memberikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang berkelanjutan.

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006). Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas

terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (*budgeting cycle*). Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.
2. *Output* (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
3. *Input* (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara *input* (masukan) dengan *output* (keluaran).

Adapun prinsip-prinsip anggaran tersebut adalah sebagai berikut: a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, b) Disiplin anggaran, c) Keadilan anggaran, d) Efisiensi dan efektivitas anggaran, e) Disusun dengan pendekatan kinerja.

Sistem anggaran berbasis kinerja yang baik dapat menggerakkan organisasi kearah yang positif, dan menghindari organisasi menyimpang jauh. Selanjutnya Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah

Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak sehingga dapat dinilai kinerja dari suatu organisasi pemerintah tersebut. Penelitian mengenai sistem anggaran berbasis kinerja yang memengaruhi kinerja telah dilakukan oleh Tubagus (2010) yang menemukan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja SKPD. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif (2013) yang menemukan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

3 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:121) laporan keuangan adalah merupakan output dari hasil akhir dan proses akuntansi laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah seperti yang tersebut diatas dibuatlah sebuah sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan keuangan setiap satuan

kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah daerah. Dari sistem ini, pimpinan SKPD dapat memonitor sudah sejauh mana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah berapa besar penyerapan dana atas program atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat dinilai apakah program tersebut sudah dilakukan dengan ekonomis, efisiensi dan efektif.

Evaluasi pencapaian kinerja SKPD secara berkala diperlukan bagi setiap pimpinan SKPD. Hal ini diperlukan agar segera mengambil langkah-langkah sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai tepat waktu. Dalam penelitiannya berjudul “Model Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Partisipasi Pengguna untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah”, Arif Yulianto dan Asrori (2009) menyimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah meningkatkan kinerja keuangan Daerah”. Hasil penelitian Arif (2013) juga menyatakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja SKPD.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 27 SKPD. Populasi yang dilakukan pada eselon III berjumlah 128 dan eselon IV berjumlah 380 sehingga total populasi yang di ambil adalah 508. Sampel penelitian ini

diantaranya: Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dengan jabatan eselon III dan IV. Pejabat eselon III seperti Kabag/Kasi/Setingkat dan IV seperti Kasubag/Kasubbid/Setingkat. Pengambilan jumlah sampel dengan mengikuti teknik sampling. Adapun teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan teknik *proportioned stratified random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 108 responden.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan diantaranya: 1) uji statistik deskriptif, 2) uji kualitas data, 3) uji normalitas data, 4) uji asumsi klasik dan 5) uji hipotesis.

Definisi Operasional Variabel

Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan secara intern, dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi

kegiatan, keandalan laporan keuangan (realisasi anggaran di sektor pemerintahan), serta ketaatan dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan intern di daerah dilakukan oleh inspektorat pada daerah tersebut yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan, *Output* (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan. *Input* (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara *input* (masukan) dengan *output* (keluaran).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Kemendagri adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan

meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Hasil survei kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan dari 108 kuesioner yang disebarkan kepada 108 responden, didapat sebanyak 78 kuesioner yang memenuhi karakteristik data penelitian.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja SKPD	78	25.00	40.00	32.5879	3.37845
Pengawasan Intern	78	34.00	47.00	41.2692	3.42896
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja	78	30.00	45.00	37.5000	3.66716
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	78	39.00	54.00	43.7179	3.74824
Valid N (listwise)	78				

Sumber: Pengolahan Data SPSS,2015

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variable kinerja SKPD, memiliki

nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32.5897 dengan standar deviasi sebesar 3.37845. Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel pengawasan intern memiliki nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum 47 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41.2692 dengan standar deviasi sebesar 3.42896. Berdasarkan pengujian statistik diatas dapat diketahui bahwa variabel sistem anggaran berbasis kinerja memiliki nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum 45 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37.5000 dengan standar deviasi sebesar 3.66716. Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum 54 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 43.7179 dengan standar deviasi sebesar 3.74824.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 41 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk degree of freedom ($df = n - 2$) dengan alpha 0,05, *n* adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2 (78-2) = 76$, sehingga didapat *r* tabel untuk $df (76) = 0,223$.

2. Hasil Uji Reliabilitas Data

Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas Data

No	Instrument Penelitian	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
1	Kinerja SKPD (Y)		0,750
2	Pengawasan Intern (X1)		0,799
3	Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (X2)		0,747
4	Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3)		0,786

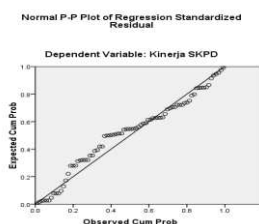
Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2015

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *cronbach alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0.60. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik p-plot. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal apabila titik menyebar disekitar garis diagonal. Berikut tabel hasil uji normalitas data :

Gambar 1
Hasil Uji Grafik P-Plot



Sumber: Pengolahan data SPSS, 2015

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel adopsi titik menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

Pengujian Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

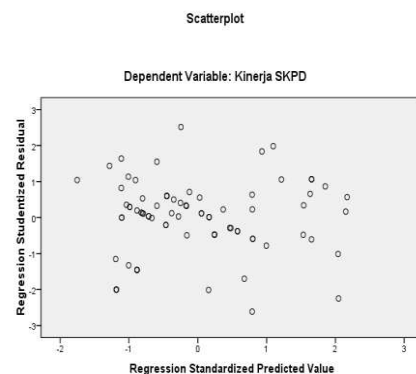
Variabel Independen	Durbin-Watson	Kesimpulan
PI SABK SIPKD	1.882	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2015

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai (Dubin Watson) terletak antara -2 dan +2 = $-2 < 1.882 < +2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan autokorelasi dalam model regresi.

2. Hasil Uji Heterokedastisitas Data

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2015

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi

dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Teknik Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2.569	3.793	
Pengawasan Intern Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.235	0.108	0.239
	0.261	0.122	0.283
	0.241	0.267	0.267

Sumber: Pengolahan Data SPSS, 2015

Persamaan regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:
 $Y = 2.569 + 0,235X_1 + 0,261X_2 + 0.241X_3 + e$

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Pengawasan Intern Berpengaruh terhadap Kinerja SKPD

Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan pemerintah yang telah digariskan. Pengawasan intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, pegawai, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: Keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi

operasi. Cara untuk mencegah adanya penyimpangan agar praktek yang sehat dapat tercapai serta kinerja organisasi dapat ditingkatkan, maka harus mengefektifkan pengawasan intern yang baik.

Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Kinerja SKPD

Sistem anggaran berbasis kinerja pada suatu instansi memiliki peranan penting dalam menjamin kinerja SKPD yang baik. Komponen-komponen visi, misi dan rencana strategis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari anggaran berbasis kinerja. Begitu halnya dengan penetapan indikator-indikator pencapaian kinerja berupa indikator *input* (masukan), *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) pastilah telah ditetapkan dalam dokumen penganggaran yaitu Rencana kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Dengan demikian penyusunan anggaran berbasis kinerja membutuhkan suatu sistem administrasi publik yang telah ditata dengan baik, konsisten dan terstruktur sehingga kinerja organisasi dapat dicapai berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) yang menyatakan bahwa SABK berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja SKPD.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja SKPD

Menurut Mudjiati (2008), sistem informasi merupakan suatu

kerangka kerja di mana sumber daya (manusia dan komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran-sasaran. Dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerjanya, pimpinan SKPD perlu dengan cepat mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau program telah terlaksana, untuk dapat mengetahui dengan cepat apakah suatu kegiatan telah terlaksana dan sudah seberapa besarkah penyerapan dan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dimaksud, maka diperlukanlah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada setiap SKPD dengan berbasis komputerisasi. Dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini pula SKPD dapat mengetahui apakah pelaksanaan tupoksinya telah berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SIPKD pada suatu instansi berperan dalam peningkatan kinerja SKPD terutama kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tubagus (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

Hasil Uji Simultan (F)

Berdasarkan hasil uji nya Diketahui nilai F sebesar 22.726 dengan signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan intern, sistem anggaran berbasis kinerja dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-

sama mempengaruhi variabel kinerja SKPD.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.691 ^a	0,478	0,457	2.48972

Sumber : pengolahan data SPSS,2015

Berdasarkan tabel diatas, Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,457. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 45,7 %. Sedangkan sisanya 54,3 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan eksternal, sumber daya manusia, komitmen organisasi yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertamamembuktikan bahwa variabel pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Primadona(2012) dan Wirawati (2014) yang mengemukakan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap Kinerja SKPD.

2. Hasil Pengujian hipotesis yang ke dua membuktikan bahwa variabel sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Tubagus (2010) dan Arif (2013) yang menyebutkan bahwa sistem anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja SKPD.
3. Hasil pengujian hipotesis yang ke tiga juga membuktikan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dari Femie (2012), Arif (2013) yang menyebutkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek.
2. Responden dalam penelitian ini hanya 3 sampai 4 orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta beberapa staf yang mewakili.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan

dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa dengan memperluas area penelitian atau menambahkan variabel, meningkatkan jumlah sampel dan melengkapi metode survei dengan melakukan wawancara. Hal ini diperlukan untuk akurasi hasil penelitian yang diperoleh dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini. Dan penulis akan memberikan saran bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu sbb :

1. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal ilmu akuntansi, dapat memberikan informasi tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi Organisasi Publik
Diharapkan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku sehingga kinerja organisasi publik diharapkan menjadi baik.
3. Bagi Daerah Pemerintah
Diharapkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan fungsinya sebagai pemerintah daerah dan pemenuhan dalam pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk masa mendatang.
4. Bagi Pihak lain yang terkait dengan penelitian selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau referensi yang berguna bagi pihak-pihak lain yang

bersangkutan untuk penelitian selanjutnya di Kabupaten Rokan Hulu atau kota, daerah lain diseluruh indonesia yang memberikan dampak yang baik bersifat praktis dan teoritis.

5. Bagi Penulis

Dapat menembah wawasan pengetahuan dan daya pikir sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami sebagai aplikasi menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dengan praktis yang sesungguhnya didunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, Republik Indonesia. (2007). *Prinsip yang menunjukkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance*

Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Bodnar, George H., and William S. Hopwood. 2006. *Accounting Information System* diterjemahkan oleh Agung Saputra., SE., S.Kom., M.Si. dan Lilis Setiawati. Yogyakarta: ANDI

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Arif, 2013. *Pengaruh sistem anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD*. Skripsi Universitas Riau.

Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Pengawasan Intern, Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol.10 No. 10.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- Wirawati, 2014. *Pengaruh Karakteristik tujuan anggaran dan pengawasan intern terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis. STIESIA Surabaya.